

infrastruktur baru. Keputusan untuk memfokuskan sinergi pada ketahanan keluarga menunjukkan pemahaman bahwa ancaman narkoba berakar pada kelemahan unit sosial dasar. Jika keluarga—sebagai unit pengasuhan primer—gagal menyediakan lingkungan yang stabil, maka *societal capability* secara keseluruhan melemah, membuka celah bagi jaringan informal destruktif (seperti "geng" remaja). Pelibatan PKK melalui Dasawisma bertujuan memperkuat kembali *societal capability* ini, mengubah keluarga dari unit rentan menjadi *front-liner* pertahanan P4GN.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### 5.1. Kesimpulan

Bahwa penanganan narkoba di tingkat lokal oleh BNN Kabupaten Purbalingga berada dalam kondisi paradoks kapasitas negara. Kapasitas negara (yang direpresentasikan oleh BNNK) menunjukkan kekuatan lingkup (*Scope*) yang tinggi dalam aspek-aspek tertentu, namun secara konsisten gagal menerjemahkannya menjadi kekuatan implementasi (*Strength*) yang efektif. Kegagalan terbesar teridentifikasi pada sektor rehabilitasi dan pencegahan. Ini dibuktikan dengan adanya *lubang hitam administrasi publik* yang melumpuhkan kapasitas negara berupa

- Kesenjangan *Strength* KIE P4GN. Meskipun BNNK berhasil melakukan penetrasi ke 92% sekolah menengah, jangkauan aktual program KIE hanya mencapai 42% dari total siswa, menyisakan 57% siswa yang tidak terintervensi.
- Kesenjangan *Strength* Layanan Rehabilitasi. Hal ini terlihat dari kegagalan mobilisasi 22 Puskesmas yang berkualifikasi untuk rehabilitasi menunjukkan fragmentasi kelembagaan di mana BNNK kesulitan mengintervensi Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) untuk menjalankan mandat P4GN.

- Kelemahan Regulasi. Dukungan formal Pemkab Purbalingga (hibah tanah) menunjukkan *Political Will* yang kuat, namun kegagalan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan Perda P4GN menciptakan kelumpuhan fungsional karena hambatan anggaran dan koordinasi.
- Kelemahan Akuntabilitas. Telihat dari adanya 14 aduan publik yang tidak ditindaklanjuti BNNK berisiko mengikis kepercayaan publik (*Social Trust*) terhadap institusi. Kelemahan pada dimensi akuntabilitas ini mempercepat Pembusukan Politik (*Political Decay*) di tingkat lokal (Fukuyama, 2014), mengubah BNNK dari agen pembangunan menjadi agen yang efektif secara simbolik tetapi gagal secara fungsional.

## 5.2. Implikasi

Studi ini mengimplikasikan bahwa analisis Kapasitas Negara harus lebih dari sekadar mengukur *Scope* (cakupan) dan *Strength* (kekuatan), melainkan harus mengidentifikasi dan mengukur kedalaman *lubang hitam administrasi publik* yang disebabkan oleh *political decay* lokal. Kapasitas negara harus diukur dari kemampuan menutup celah implementasi (*closing the implementation gap*), bukan hanya dari keberhasilan perluasan jangkauan. Dalam konteks ancaman non-tradisional seperti narkoba, kepercayaan publik menjadi variabel kapasitas negara yang paling krusial (Fukuyama, 2020; Ladiqi, 2020). Pemerintah daerah harus memprioritaskan akuntabilitas untuk memulihkan kepercayaan, karena partisipasi masyarakat (seperti pada model Desa Bersinar) adalah penopang utama ketika *Strength* birokrasi formal lemah.

Kegagalan Perbup menegaskan perlunya reformasi birokrasi yang memprioritaskan regulasi yang memobilisasi aset daripada yang hanya bersifat deklaratif. Aturan hukum harus dipastikan mampu mengatasi fragmentasi kelembagaan (lokal vs vertikal), agar menghindari hambatan birokrasi baru (*administrative burdens*).